



Sistem Akuntansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya

Hafiza¹, Dewi Sartika², Lilis Marlina³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received : 20 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 15 Januari 2025

KEYWORDS

Government Accounting System, Clarity of Budget Targets, Performance-Based Budget, Accountability of Government Agency Performance

CORRESPONDENCE

E-mail: hafiza14072000@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effects of the Government Accounting System, Clarity of Budget Targets, and Performance-Based Budgeting on the Accountability of Government Agency Performance (AKIP) in the Department of Agriculture and Food, Southwest Aceh Regency. Using purposive sampling, 35 employees directly involved in budgeting processes were selected as respondents. Data were analyzed using multiple linear regression. The results show that the Government Accounting System, Clarity of Budget Targets, and Performance-Based Budgeting each have a significant positive effect on AKIP. Simultaneously, these three variables also influence AKIP, indicating that effective accounting practices, clear budget objectives, and performance-oriented budgeting collectively enhance government performance accountability. Future studies are encouraged to include additional variables, broader samples, and different methods to strengthen generalizability.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah ialah isu strategis dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Peningkatan kualitas akuntabilitas dinilai krusial dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, yang mencakup transparansi, partisipasi, dan efisiensi pelayanan publik (Nugraeni, 2019). Akuntabilitas yang tinggi diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik, baik dalam aspek politik melalui keterbukaan informasi, maupun dalam bidang ekonomi melalui terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Selain menjadi tuntutan publik, akuntabilitas juga merupakan kewajiban normatif bagi seluruh instansi pemerintah. Setiap lembaga dituntut menunjukkan kinerja yang terukur dan bertanggung jawab (Khusaini, 2018). Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia telah melaksanakan sistem AKIP berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, yang diperkuat dengan berbagai keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban publik (Arjuna & Annie, 2019).

Namun, pelaksanaan akuntabilitas masih menghadapi berbagai kendala. Ketidaktepatan sasaran program seringkali menyebabkan pemborosan anggaran dan rendahnya efektivitas kegiatan pemerintah (Deny, 2019). Pada periode 2017-2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami kasus penyimpangan anggaran, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp695 juta, menjadi contoh konkret lemahnya sistem akuntansi dan akuntabilitas (Serambinews.com, 2023).

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas adalah penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP berperan dalam pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban transaksi keuangan

secara transparan dan akuntabel (Mulyadi, 2017; Mulyani & Suryawati, 2016; Weskornis & Suraida, 2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi SAP memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah (Budiani & Asyik, 2021; Mulya et al., 2022).

Faktor lain yang turut memengaruhi akuntabilitas adalah kejelasan sasaran anggaran. Anggaran yang tidak dirumuskan dengan tujuan yang jelas dapat menurunkan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebaliknya, perencanaan anggaran yang terarah mendorong kinerja yang lebih optimal (Gani, 2020; Sapriila, 2022). Selain itu, pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas. ABK mengutamakan hubungan antara alokasi anggaran dengan output dan outcome yang diharapkan, bukan sekadar penyerapan anggaran (Syuliswati, 2015; Suhartono & Solichin, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, studi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh SAP, kejelasan tujuan anggaran, dan ABK terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan fokus pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang menghadapi tantangan serius dalam penerapan prinsip akuntabilitas publik. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akuntabilitas sektor publik, khususnya dalam konteks penerapan sistem akuntansi dan manajemen kinerja di tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan transparansi serta kinerja pelayanan publik.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Pustaka

Grand Theory: Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Edwin Locke mengembangkan goal setting theory dimana konsep ini menjelaskan bahwa planning yang jelas dan menantang akan meningkatkan semangat kerja dan hasil kerja individu seseorang. Teori ini berasumsi bahwa individu akan lebih terdorong untuk mencapai sasaran yang spesifik dan menantang dibandingkan dengan sasaran yang bersifat umum atau terlalu mudah.

Terdapat empat mekanisme utama dalam teori ini yang menjelaskan bagaimana tujuan dapat memengaruhi kinerja, yaitu: (1) tujuan mengarahkan perhatian individu pada hal-hal yang relevan; (2) meningkatkan intensitas upaya; (3) memperpanjang ketekunan dalam menyelesaikan tugas; serta (4) mendorong individu untuk mengembangkan strategi atau pendekatan yang efektif dalam mencapai tujuan. Komitmen terhadap tujuan juga menjadi unsur penting dalam teori ini. Semakin tinggi komitmen individu terhadap suatu sasaran, maka semakin besar kemungkinan sasaran tersebut akan tercapai. Dalam konteks instansi pemerintah, tujuan kinerja yang jelas dan terukur penting dalam mendukung pencapaian akuntabilitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, Goal Setting Theory menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana akuntabilitas instansi dapat ditingkatkan melalui penetapan tujuan yang tepat.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ialah tanggung jawab setiap unit organisasi dalam menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban hasil maupun kegagalan dalam menggapai tujuan yang telah diputuskan. Bentuk pertanggungjawaban ini biasanya disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan kinerja kepada publik atau lembaga pengawas (Ayu, 2020). Akuntabilitas publik menjadi faktor utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang apik. Bastian (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas kinerja memiliki beberapa indikator, yaitu: pemasukan, proses, pengeluaran, hasil, dampak, dan manfaat. Keenam indikator tersebut mencerminkan tahapan pelaksanaan program yang harus dipertanggungjawabkan secara menyeluruh, baik dari segi sumber daya yang digunakan hingga hasil akhir yang dirasakan masyarakat.

Menurut LAN RI dan BPKP (2013), seluruh instansi pemerintah wajib memahami ruang lingkup akuntabilitasnya, karena pertanggungjawaban tersebut mencakup aspek keberhasilan maupun kegagalan misi

organisasi. Artinya, akuntabilitas tidak hanya menyoroti capaian, tetapi juga mengevaluasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja yang diharapkan.

Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP ialah sistem informasi keuangan yang terstruktur dan digunakan dalam mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan. SAP mengintegrasikan prosedur manual dan teknologi informasi untuk mendukung proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah (Mulyadi, 2017).

Permendagri No. 64 Tahun 2013 menjelaskan bahwa SAP harus mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual yang mencerminkan informasi keuangan secara menyeluruh, mulai dari pendapatan, belanja, hingga aset dan kewajiban pemerintah daerah. SAP juga harus selaras dengan kebijakan akuntansi dan standar yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya (Mulyani & Suryawati, 2016).

Penelitian terdahulu (Mulya et al., 2022; Budiani & Asyik, 2021) menunjukkan bahwa penerapan SAP yang baik berkontribusi positif akan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. SAP memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, hingga tahap evaluasi dan penentuan keputusan menjadi lebih efisien dan transparan.

Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)

Kejelasan tujuan anggaran berpacu pada tingkat kejelasan dan spesifikasi tujuan yang hendak dicapai melalui anggaran. Sasaran yang jelas dan terukur akan mempermudah pelaksana dalam memahami tanggung jawab serta menetapkan strategi untuk mencapainya.

Menurut Khumaidah (2018), sasaran anggaran yang baik mesti memenuhi lima karakteristik, yaitu: spesifik, proporsional, realistis namun menantang, fokus pada hasil, dan mempunyai deadline. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, instansi pemerintah dapat menyusun anggaran yang lebih efektif dan akuntabel. Penelitian Budiani dan Asyik (2021) juga membuktikan bahwa semakin jelas tujuan pendanaan yang ditetapkan, maka meingkat pula akuntabilitas kinerja yang tercapai oleh instansi terkait.

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

Performance-Based Budgeting ialah pendekatan perencanaan yang mengaitkan alokasi dana dengan hasil (output dan outcome) yang ingin dicapai oleh organisasi. Pendekatan ini memiliki tujuan agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan dana dalam rangka mencapai sasaran strategis (Mardiasmo, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004, penganggaran berbasis kinerja harus disusun dengan tiga komponen pokok, yaitu parameter performa, standar biaya, dan penilaian kinerja. Ketiganya digunakan untuk mengukur ketercapaian program yang telah dirancang secara objektif, serta menilai efisiensi pelaksanaan kegiatan berdasarkan perbandingan antara rencana dan realisasi.

Penelitian sebelumnya oleh Suhartono dan Solichin (2016) memperlihatkan jika implementasi prndanaan berbasis kinerja mempunyai hubungan signifikan kan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, ABK tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan dana, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik.

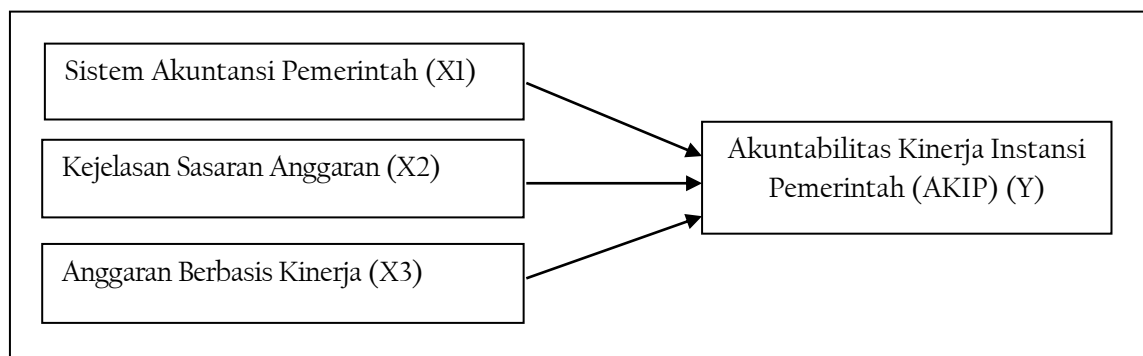
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada studi ini dilandaskan pada hubungan teoritis dan empiris antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu:

a. Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP berperan sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dengan prosedur pencatatan dan pelaporan yang sesuai standar, SAP membantu instansi pemerintah menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel (Fathia, 2017).

- b. Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA)
Kejelasan dalam tujuan anggaran akan mempermudah pelaksanaan serta evaluasi program pemerintah. Ketidakjelasan anggaran berpotensi menimbulkan kebingungan dan menurunkan kinerja pelaksana, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap akuntabilitas (Nurkholis, 2019).
- c. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Pendekatan ini mendorong efisiensi dan efektivitas dalam alokasi anggaran, karena dana yang tersedia dialokasikan berdasarkan hasil yang ingin dicapai. ABK memungkinkan pengukuran kinerja yang lebih objektif sehingga dapat meningkatkan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2018).
- d. Pengaruh Simultan SAP, KSA, dan ABK terhadap AKIP
Ketiga variabel tersebut secara bersamaan diyakini dapat memengaruhi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Penerapan sistem akuntansi yang baik, kejelasan dalam perencanaan anggaran, serta orientasi anggaran terhadap hasil, diyakini memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis

Berlandaskan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, hingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai dibawah ini:

- H1 : Sistem Akuntansi Pemerintah berpengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- H2 : Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai pengaruh akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- H3 : Anggaran Berbasis Kinerja memiliki pengaruh pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- H4 : Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Anggaran Berbasis Kinerja secara bersamaan mempunyai pengaruh akan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis studi yang bersifat asosiatif. Metode ini diterapkan untuk mengkaji hubungan atau dampak antara variabel independen, yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA), dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), akan variabel dependen yang berupa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Arah studi asosiatif ini ialah untuk menentukan apakah terdapat dampak antara variabel-variabel yang diteliti.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Pangan daerah Aceh Barat Daya. Pelaksanaan penelitian akan berlangsung dari bulan Februari hingga Mei 2024, yang mencakup tahapan penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan hasil studi.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti pada studi ini mencakup semua staf yang bekerja di Dinas Pertanian dan Pangan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan total sebanyak 160 individu.

Pengutipan sampel dilaksanakan dengan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Dalam studi ini, kriteria yang ditetapkan mencakup karyawan yang secara langsung terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Berdasarkan kriteria ini, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 individu.

Jenis dan Sumber Data

Tipe data yang terdapat dalam penelitian ini mencakup data pokok dan data pendukung. Informasi utama didapatkan langsung dari para responden lewat distribusi kuesioner. Informasi tambahan bersumber dari dokumen resmi, laporan keuangan, serta peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi yang diterapkan dalam studi ini adalah menggunakan angket atau kuesioner yang bersifat tertutup, yang disusun menggunakan skala Likert lima poin. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam proses analisis.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menjelaskan konsep dari setiap variabel yang diteliti, ialah:

- a. Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP): sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyusun laporan keuangan secara sistematis.
- b. Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA): Sejauh mana target pendanaan disusun dengan jelas, dapat diukur, dan sesuai
- c. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK): pendekatan penganggaran berdasarkan hasil (output dan outcome) yang ingin dicapai.
- d. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP): seberapa besar tanggung jawab lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya dan pengeluaran anggaran dengan cara yang efektif dan efisien.

Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas diterapkan agar menjamin bahwa setiap persoalan pada kuesioner benar-benar mencerminkan apa yang dimaksud untuk diukur. Di sisi lain, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai seberapa konsisten instrumen dalam menghasilkan data.

b. Uji Asumsi Klasik

Meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas agar memastikan jika model regresi linear memenuhi asumsi dasar.

c. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dipakai untuk memahami dampak variabel independen terhadap variabel dependen baik secara terpisah maupun bersamaan. Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Kinerja
- X₁ = Sistem Akuntansi Pemerintah
- X₂ = Kejelasan Sasaran Anggaran
- X₃ = Anggaran Berbasis Kinerja
- a = Konstanta
- b₁, b₂, b₃ = Koefisien regresi
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi informasi dalam studi ini mencakup reaksi partisipan terhadap variabel-variabel yang dianalisis, yaitu:

a. Sistem Akuntansi Pemerintah (X₁)

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa mayoritas peserta memberikan tanggapan yang baik terkait aspek-aspek yang menilai pelaksanaan SAP. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang digunakan telah dijalankan sesuai dengan prinsip dan standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya.

b. Kejelasan Sasaran Anggaran (X₂)

Sebagian besar responden menyatakan bahwa sasaran anggaran di instansi mereka sudah disusun secara spesifik dan terukur. Ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah memperhatikan indikator keberhasilan yang relevan dengan program kerja instansi.

c. Anggaran Berbasis Kinerja (X₃)

Responden menilai bahwa pendekatan berbasis kinerja sudah mulai diterapkan dalam proses penganggaran. Namun demikian, beberapa responden mencatat bahwa belum semua program memiliki indikator outcome yang terukur secara optimal.

d. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Sebagian besar responden memberikan jawaban positif terhadap item yang mengukur akuntabilitas, seperti pelaporan berkala, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa budaya akuntabilitas mulai berkembang secara positif di lingkungan instansi.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

- a. Untuk memastikan validitas model regresi, dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi klasik:
- b. Uji Normalitas memperlihatkan jika data memiliki distribusi normal.
- c. Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0, yang berarti tidak ada multikolinearitas.
- d. Uji Heteroskedastisitas tidak menunjukkan pola tertentu, sehingga dapat diringkas tidak adanya heteroskedastisitas dalam regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat hasil dari analisis regresi linier ganda dengan rumus regresi linier ganda yang berupa:

$$Y = 12,398 + 0,236X_1 + 0,614X_2 + 0.580X_3 + e$$

- 1) Nilai konstanta sebesar 12,398 (AKIP) menunjukkan bahwa apabila variabel Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja dalam keadaan konstan (tetap), maka akan terjadi peningkatan AKIP sebesar 12,398 persen.
- 2) Koefisien Sistem Akuntansi Pemerintah (X_1) adalah 0,236. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Sistem Akuntansi Pemerintah, maka akan menaikkan AKIP sebesar 0,236 persen. Sebaliknya jika setiap penurunan satu persen sistem akuntansi pemerintah, maka akan menurunkan AKIP sebesar 0,236 persen.
- 3) Koefisien Regresi Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2) adalah 0,614. Ini disimpulkan jika setiap naik satu persen Kejelasan Sasaran Anggaran, maka akan menaikkan AKIP sebesar 0,614 persen. Sebaliknya jika setiap penurunan satu persen kejelasan sasaran anggaran, maka akan menurunkan AKIP sebesar 0,614 persen.
- 4) Koefisien Regresi Anggaran Berbasis Kinerja (X_3) adalah 0,580. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen Anggaran Berbasis Kinerja, maka akan menaikkan AKIP sebesar 0,580 persen. Sebaliknya, jika anggaran berbasis kinerja dipotong satu persen, maka AKIP akan berkurang sebanyak 0,580 persen.

Tabel 1. Hasil analisis regresi berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	12,398	4,367	
	Sistem Akuntansi Pemerintah	,236	,185	,187
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,614	,141	,723
	Anggaran Berbasis Kinerja	,580	,310	,305

Sumber: output SPSS, Data diolah, 2025

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

- a) Analisis pengaruh sistem akuntansi pemerintah terhadap AKIP
 Hasil temuan statistik untuk variabel sistem akuntansi pemerintah memperlihatkan jika nilai thitung (3,277) melebihi t tabel (1,696), dan nilai Sig. lebih rendah dari α yang merupakan $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu, temuan dari penelitian ini menolak H_0 dan menyokong H_1 , yang menunjukkan jika sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah memiliki dampak terhadap AKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- b) Analisis Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap AKIP
 Berdasarkan analisis statistik untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, diperoleh nilai thitung sebesar 4,363, yang lebih tinggi dibandingkan dengan t tabel yang bernilai 1,696, serta nilai Sig. berada di bawah α yaitu $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, temuan penelitian ini menolak H_0 dan menerima H_1 , yang menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran memiliki pengaruh akan AKIP pada Dinas Pertanian dan Pangan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- c) Analisis Pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap AKIP
 Berdasarkan analisis statistik untuk variabel anggaran yang didasarkan pada kinerja, didapatkan bahwa nilai thitung (3,870) berada di atas t tabel (1,696), dan nilai Sig. yaitu $0,001 < 0,05$. Sebagai hasil dari penelitian ini, H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang menunjukkan bahwa anggaran yang berorientasi pada kinerja memiliki dampak terhadap AKIP di Dinas Pertanian dan Pangan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Uji F (Uji Simultan)

Dari analisis Anova atau uji F yang dilakukan, didapatkan nilai Fhitung sebesar 8,971 dengan nilai Signifikansi 0,000. Selanjutnya, langkah yang diambil adalah mencari Ftabel dan membandingkannya dengan Fhitung yang diperoleh. Maka, diketahui bahwa Ftabel adalah 2,911 (sumber: Lampiran Tabel F). Karena Fhitung 8,971 lebih besar dari Ftabel 2,911, dan nilai signifikansi adalah $0,000 < 0,05$, dengan sebab itu, dapat dirangkum jika Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Anggaran yang Berorientasi pada Kinerja secara bersama-sama mempengaruhi AKIP di Dinas Pertanian dan Pangan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil uji ini, dapat diidentifikasi dampak antara variabel sistem akuntansi pemerintah, kejelasan tujuan anggaran, serta anggaran yang berbasis kinerja terhadap AKIP di Dinas Pertanian dan Pangan daerah Aceh Barat Daya. Penulis menjelaskan bahwa nilai Adjusted R Square = 0,413, yang menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi pemerintah, kejelasan tujuan anggaran, dan anggaran berbasis kinerja menunjukkan dampak sebesar 41,3% akan AKIP, dengan selebihnya 58,7% dipengaruhi oleh elemen atau faktor lain yang tidak terjangkau dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mulya et al. (2022) yang menyatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah yang baik meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas instansi. Penerapan SAP secara efektif membantu memastikan transparansi dan konsistensi informasi keuangan dalam pengambilan keputusan publik.

Kejelasan sasaran anggaran terbukti mendorong efisiensi pelaksanaan program karena memberikan arah yang jelas bagi pelaksana kegiatan (Budiani & Asyik, 2021). Perumusan sasaran yang terukur mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja instansi, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai prioritas.

Sementara itu, penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menggeser paradigma pengelolaan keuangan dari berorientasi pada input menuju hasil (output dan outcome). Temuan ini mendukung penelitian Suhartono & Solichin (2016) yang menegaskan bahwa ABK memperkuat akuntabilitas publik melalui transparansi dan efisiensi dalam penganggaran.

Secara sintesis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, dan Anggaran Berbasis Kinerja secara bersama-sama berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan sistem tata kelola keuangan yang transparan, terukur, dan berorientasi hasil. Dengan demikian, temuan ini relevan sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan daerah menuju praktik *good governance* yang lebih akuntabel dan berintegritas.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Simpulan

Berlandaskan temuan peneliti yang ditemukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki hubungan positif dengan signifikan akan akuntabilitas kinerja. Hal ini memperlihatkan jika semakin baik implementasi sistem akuntansi, maka akuntabilitas yang ditunjukkan oleh instansi pemerintah dalam mengelola keuangan dan pelaporan kerjanya semakin baik.
- 2) Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) terbukti mempunyai pengaruh akan akuntabilitas kinerja yang signifikan. Sasaran anggaran yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dan relevan mampu meningkatkan tanggung jawab pelaksana anggaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

- 3) Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) menunjukkan pengaruh positif terhadap akuntabilitas. Pendekatan ini mendorong fokus pada hasil dan manfaat dari setiap program yang dijalankan, sehingga menciptakan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
- 4) Secara bersamaan, ketiga variabel independen (SAP, KSA, dan ABK) mempunyai pengaruh akan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah secara signifikan. Kombinasi penerapan sistem akuntansi yang baik, perencanaan anggaran yang jelas, serta orientasi penganggaran pada hasil, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pertanggungjawaban publik.

Saran

Berlandaskan hasil temuan dan ringkasan di atas, penulis menghimbau saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah: Disarankan agar terus meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, khususnya dalam hal pelatihan teknis dan penyediaan sarana pendukung agar pelaporan keuangan semakin akurat dan tepat waktu.
2. Bagi Pengelola Anggaran: Perlu memastikan bahwa setiap perencanaan anggaran disusun dengan sasaran yang jelas, realistis, dan selaras dengan penunjuk kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini akan mempermudah evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
3. Bagi Instansi Terkait: Perlu meningkatkan pemahaman dan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja secara menyeluruh, tidak hanya pada level perencanaan, tetapi juga dalam implementasi dan pelaporannya. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala juga penting dilakukan.
4. Bagi Peneliti berikutnya: dinantikan dapat mengembangkan objek penelitian pada instansi atau sektor yang berbeda, serta menambahkan variabel lain seperti kepemimpinan, integritas, atau sistem pengawasan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengungkapkan rasa syukur kepada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan penelitian ini, terutama kepada dinas pertanian dan pangan di kabupaten Aceh Barat Daya, semua responden yang berpartisipasi dalam penelitian, serta dosen pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan dan dukungan yang memungkinkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

REFERENSI

- Arjuna, D., & Annie, H. (2019). *Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 145–160
- Ayu, P. D. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Kinerja terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 55–66.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budiani, F., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–18.
- Devika, A. A., & Eni, P. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(3), 25–34.
- Gani, S. (2020). *Kejelasan Sasaran Anggaran dan Dampaknya terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 98–107.
- Khumaidah, H. (2018). Penyusunan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(2), 44–53.
- LAN RI & BPKP. (2013). *Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mulya, H. M., & Fauzihardani, F. (2022). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah dan Kepatuhan Regulasi terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 12–25.

- Mulyadi, D. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyani, S., & Suryawati, N. (2016). Sistem Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 7(1), 89–100.
- Nugraeni, D. A. (2019). Peran Akuntabilitas dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Administrasi Negara*, 5(1), 71–82.
- Nurkholis, M. (2019). Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja di Sektor Publik. *Jurnal Akuntabilitas*, 8(3), 113–123.
- Sapriila, M. (2022). Hubungan Kejelasan Tujuan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(2), 64–75.
- Suhartono, S., & Solichin, M. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 3(1), 33–41.
- Sumiati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berbasis Anggaran Kinerja. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 9(1), 50–59.
- Syuliswati, I. (2015). Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perspektif Manajemen Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Administrasi Publik*, 4(2), 92–101.
- Weskornis, D., & Suraida, S. (2018). Evaluasi Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(1), 21–30.
- Yuniarti, D. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Praktik Akuntansi*, 10(1), 41–49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/1999 dan No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan AKIP.